

DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN NIKEL PT. VALE AKIBAT PEMBANGUNAN SMELTER DI PROVINSI SULAWESI

Novi Ambarwati ^[1], Dyah Aziz Suwitaningsih ^[1], Lalu M Ridho H. S ^[1], Christian Vieri Haisoo ^[1], Yusuf Pramujaningtyas N. P ^[1], Mhd. Hilal Fikri ^[1], Edrian ^[1], Kalvarius Thomas W.B ^[1], Melkianus Markus Enus ^[1]

^[1]Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)
Jl. Arief Rachman Hakim, No. 100, Surabaya

e-mail : novyambarwaty00@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan smelter dapat menimbulkan beberapa dampak pada usaha pertambangan yang ada. Diantaranya ialah : dampak terhadap tenaga kerja (SDM), dampak terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dampak ekonomi terhadap pabrik pengolahan dan pemurnian nikel, dampak pembangunan smelter terhadap lingkungan sekitar. Namun dengan adanya pembangunan smelter, maka dapat mengolah hasil tambang mentah menjadi hasil tambang olahan yang akan meningkatkan harga jual tambang tersebut. Dengan demikian, maka akan dapat meningkatkan nilai perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui lebih dalam tentang suatu permasalahan usaha pertambangan akibat pembangunan smelter. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan literatur review dari berbagai sumber. Dalam hal ini, pembahasan tentang pembangunan smelter sangat memiliki pengaruh yang cukup besar.

Keyword : Smelter, Dampak

ABSTRACT

The construction of a smelter can have several impacts on existing mining businesses. Among them are: the impact on labor (HR), the impact on gross regional domestic product (GRDP), the economic impact on nickel processing and refining plants, the development of smelter construction on the surrounding environment. But with the construction of a smelter, it can process mining products into processed products which will increase the selling price of the mine. Thus, it will be able to increase the value of growth in Indonesia. Smelter. The research method used uses a literature review from various sources. In this case, the discussion on the construction of smelters has considerable support.

Keywords: Smelter, Impact

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan teknologi, semua orang atau perusahaan selalu berusaha dalam meningkatkan kualitas produk miliknya dengan memanfaatkan sumber daya alam, maupun sumber daya manusia dengan semaksimal-maksimalnya. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan berbagai cara tanpa harus merusak alam. Dalam dunia pertambangan, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak lupa untuk tetap menjaga alam. Tahapan dalam memulai kegiatan penambangan dimulai dari prospeksi atau penyelidikan ada atau tidaknya suatu mineral berharga. Langkah selanjutnya ialah eksplorasi yaitu penelusuran lebih lanjut suatu material berharga. Material berharga dapat berupa nikel, emas, tembaga, ataupun yang lainnya. Nikel merupakan hasil tambang yang memiliki karakteristik yang tahan oksidasi dan korosi. Nikel dapat dimanfaatkan

sebagai baterai isi ulang dan lain sebagainya. Tambang nikel yang ada di Indonesia sangatlah banyak, salah satunya adalah PT. Vale yang ada di Sulawesi. PT. Vale melakukan penambangan dengan metode open pit atau tambang terbuka. Pt Vale dapat menghasilkan nikel dalam bentuk matte, yang merupakan produk bijih lateritik pada fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan smelter yang ada, bertujuan guna mengolah bijih mineral. Pemerintah melalui Undang-Undang No.4/2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) mewajibkan perusahaan pertambangan agar membangun pabrik pengolahan bijih mineral (smelter). Pembangunan ini dilakukan guna menambah nilai jual mineral, membuka lapangan kerja baru. Namun, terdapat beberapa dampak usaha pertambangan nikel pt. Vale akibat pembangunan smelter di provinsi sulawesi yaitu :

Pembangunan Smelter Di PT. Vale

PT Vale Indonesia telah merencanakan akan membangun pabrik smelter (pabrik pengolahan) baru di Pomala, Sulawesi Tenggara. Pembangunan ini juga dibarengi oleh ekspansi tahap kedua smelter Soroako, Sulawesi Selatan. Total nilai investasi proyek di Kolaka ini akan menghabiskan biaya sekitar USD1,5 miliar. Perseroan akan menggabungkan pendanaan internal, loan, dan dari mitra strategis. Untuk pengembangan di Kolaka, perseroan akan bekerja sama dengan Sumitomo Metal Mining Co Limited dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV).

Dampak Pembangunan Smelter Terhadap Lingkungan Sekitar

Pabrik pengolahan bijih nikel ini memiliki kapasitas ±40.000 ton nikel dalam MSP (mixed sulfide precipitate) setiap tahunnya. Dalam proyek ini PT Vale Indonesia menjalankan suatu program pengembangan masyarakat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hal ini karena PT Vale memiliki kawasan Kontrak Karya seluas 35.486 hektar di provinsi tersebut.. Atas usulan Pemerintah Kabupaten Kolaka, PT Vale mengalokasikan dana CSR 2014 untuk mendukung pengembangan visi di area tanaman pangan. Wilayah yang dijadikan lumbung padi dan kedelai di Kolaka adalah Desa Lamedai, Kecamatan Tangetada. Potensi persawahan di Lamedai mencapai 1.500 hektar, meskipun hingga saat ini sekitar 700 hektar sawah yang digarap oleh petani.

Program CSR memiliki dampak yang positif bagi masyarakat tergantung pada orientasi dan kapasitas perusahaan smelter, dan terutama pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai pengelola sumber daya alam. Pemahaman terhadap CSR merupakan suatu kunci untuk keberlangsungan investasi bisnisnya, yaitu:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan. Melakukan kegiatan CSR maka secara otomatis akan membuat konsumen menilai perusahaan selalu melakukan hal baik pada masyarakat
- 2) Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tidaklah mudah untuk dapat dikerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dan masyarakat. Maka perusahaan dapat membuka pengetahuan dan pengalaman yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
- 3) Membedakan perusahaan. Jika CSR dilakukan sendiri maka, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulannya sehingga dapat membedakannya dengan perusahaan serupa..

Dampak terhadap Tenaga Kerja (SDM)

Kesempatan kerja, secara tidak langsung berhubungan dengan pendapatan nasional (PDB) atau

pendapatan regional(PDRB). Tingginya jumlah pekerja akan menyebabkan naiknya PDRB. Makin banyak barang dan jasa yang dihasilkan karena besarnya angkatan kerja, maka makin tinggi PDRB pada wilayah tersebut, yang memungkinkan dilakukannya tabungan yang selanjutnya dapat digunakan untuk investasi, selanjutnya investasi akan memperbesar kesempatan kerja. Masalah lain berhubungan dengan PDRB dan kesempatan kerja ialah tingkat produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara akan naik jika terjadi peningkatan angkatan kerja juga peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah itu. Sebaliknya, pengangguran secara tidak langsung berhubungan juga dengan pendapatan regional. Tingginya jumlah pengangguran di wilayah tertentu akan berdampak pada turunnya PDRB. Makin banyak pengangguran di wilayah tertentu makin sedikit barang dan jasa yang dihasilkan, makin kecil PDRB wilayah tersebut dapat memungkinkan tabungan wilayah tersebut makin kecil juga, selanjutnya pendapatan untuk investasi juga akan menurun, dan akan memperkecil peluang kesempatan kerja di wilayah tersebut. Adanya pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan dampak positif dengan adanya penyerapan tenaga kerja mulai tahun 2015 sebanyak 8.104 jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan dimulainya operasi pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di wilayah tersebut. Sehingga jumlah tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 berjumlah 1.085.509 jiwa + 8.104 jiwa menjadi 1.093.613 jiwa, dan akan terus meningkat sesuai dengan rencana penyelesaian pabrik pengolahan. Dan dampak negatif dari pembangunan pabrik pengolahan ini adalah;

- 1) Selama masa pengerjaan pabrik pengolahan ini dikerjakan maka pendapatan sementara dari sektor pertambangan hilang dikarenakan berhentinya kegiatan pertambangan.
- 2) Terjadinya pemutusan hubungan kerja sampai pembangunan smelter selesai.
- 3) Untuk sementara akan terjadi keresahan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pekerjaan tambang
- 4) Terganggunya pasar dunia yang selama ini bergantung pada bahan mentah Indonesia.

Dampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi dalam suatu negara dalam satu tahun ini, termasuk hasil produksi dan jasa yang dihasilkan perusahaan/orang asing yang berada di negara bersangkutan wilayah/kabupaten/kota/provinsi selama satu tahun, termasuk hasil produksi dan jasa yang dihasilkan perusahaan/ orang asing yang berada di wilayah

bersangkutan. Produk domestic bruto maupun produk domestic regional bruto, meski atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga tetap, merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.

a) PDB dan PDRB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi wilayah, kabupaten, kota, provinsi dan negara bersangkutan;

b) PDB dan PDRB atas dasar harga tetap menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengetahui hasil pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun wilayah, kabupaten, kota, provinsi dan negara bersangkutan. Berdasarkan harga tetap pada tahun 2010 dan pada tahun 2012, pendapatan regional bruto Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai angka Rp59,78 triliun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.345.465 jiwa, maka pendapatan perkapita/perkepala keluarga sebesar Rp25.489.785. Pada tahun 2013, pendapatan regional meningkat menjadi Rp64,27 triliun dan jumlah penduduk menjadi 2.369.713 jiwa, sehingga pendapatan perkapita sebesar Rp26.817.472. Di tahun 2014, pendapatan regional meningkat lagi menjadi Rp68,30 triliun dan jumlah penduduk sebanyak 2.448.081 jiwa, sehingga pendapatan perkapita sebesar Rp27.898. Selama tiga tahun terakhir dari (2012 - 2014), perkembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan rata-rata 6,26% setiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Sektor Pertambangan memberikan kontribusi paling tinggi kedua setelah Sektor Pertanian dan Kehutanan, sementara sektor penyumbang terkecil adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Dampak Ekonomi Terhadap Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian Nikel

Peraturan Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebagai dari upaya peningkatan nilai tambah mineral dan/atau batubara (Pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1)). Khusus untuk mineral nikel, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri, menjelaskan bahwa nikel itu wajib untuk dimurnikan sebelum mineral nikel itu dijual ke luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan smelter di

Provinsi Sulawesi Tenggara akan menghasilkan logam nikel dalam bentuk nikel mate, logam paduan, dan lain-lain. Dengan adanya rencana pembangunan pabrik pengolahan (smelter) nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut. Dampak positif dari rencana pembangunan pengolahan dan pemurnian nikel terhadap pendapatan dan sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara secara langsung ialah :

- 1) Akan meningkatnya perekonomian daerah yang berupa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
- 2) Bertambahnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.
- 3) Adanya peningkatan pendapatan setiap perkapita/kepala keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah melalui Undang-Undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) mewajibkan perusahaan pertambangan agar membangun pabrik pengolahan bijih mineral (smelter). Pembangunan ini dilakukan guna menambah nilai jual mineral, membuka lapangan kerja baru. Jika kita telaah dari suatu kebijakan, terlihat pemerintah memberikan ruang kembali untuk ekspor mineral bagi perusahaan pertambangan karena sampai 2014 kebijakan tersebut terus mengalami revisi dan perubahan serta membuka kesempatan ekspor mineral mentah dengan memperpanjangnya. Dan sampai tahun 2017, pemerintah mengeluarkan kembali peraturan pemerintah untuk memperpanjang kembali 5 (lima) tahun kegiatan ekspor mineral mentah melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 dan pada Permen ESDM nomor 5 dan 6 tahun 2017. Jia dilihat dari berjalannya kebijakan tersebut, dapat terlihat pemerintah seperti tidak serius dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Hal ini lah yang menyebabkan kebigungan para stake holder. Dalam hal ini, perusahaan pertambangan dan pengusaha smelter, serta pemerintah sendiri yang memperlambat kebijakan kewajiban smelter tersebut. Perubahan kebijakan yang terjadi bukan pada kejelasan kapan batas waktu yang pasti akan dilaksanakannya penutupan ekspor mineral mentah dan sanksi yang tegas yang harus diberikan ketika perusahaan tidak patuh terhadap Undang-Undang Pertambangan. Ketika pembangunan smelter telah terjadi, banyak manfaat yang bisa diambil diantaranya yaitu meningkatnya nilai jual hasil olahan, dapat meningkatnya nilai perekonomian di Indonesia.

KESIMPULAN

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya mineral nikel sangat besar yang dapat diolah menjadi nikel mate, feronikel, atau nikel olahan lainnya sesuai peraturan mengenai peningkatan nilai tambah, namun dengan kehadiran peraturan menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di dalam Negeri, juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, yang di dalamnya memuat kewajiban pemurnian nikel (dalam bentuk logam, bukan konsentrat) sebelum dijual ke luar negeri setelah memenuhi persyaratan tertentu, peraturan ini mengakibatkan banyak terjadinya PHK akibat dari tidak sedikitnya perusahaan tambang yang gulung tikar karena alasan yang tidak ekonomi. Yang dimana seharusnya pemerintah tidak mewajibkan kebijakan pembangunan smelter ini bagi perusahaan perusahaan tambang kecil yang tentu belum sanggup untuk membangun smelter yang memakan sangat banyak biaya, dengan begitu perusahaan perusahaan tambang masih bisa beroperasi walaupun dengan harga atau nilai mineral yang masih seperti biasa tetapi angka pengangguran di Negara tidak akan bertambah dan tentu akan menjadi sumber penghasilan bagi pekerja pekerja tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S. (2001). Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Penerbit PT Pradya Paramita. Jakarta.
- Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer .penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta, 2010
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi”, Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, 2008
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta, 2010